

**PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN DAN PERAN
MANAJERIAL PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(Studi Pada Pemerintah Kota Manado)**

Oleh

Dhullo Afandi

Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNSRAT Manado

Abstract

Sejarah Indonesia menunjukkan selama lebih dari tiga dekade, pada waktu orde baru berkuasa, proses penyusunan anggaran masih jauh dari kata aspiratif. Bukan hanya tidak aspiratif, selama periode orde baru berkuasa anggaran kita yang menganut sistem anggaran rutin dan anggaran pembangunan, juga dibelit berbagai persoalan kronis seperti pemborosan, kebocoran, penyimpangan, dan penyelewengan. Keberhasilan gerakan reformasi di Indonesia yang ditandai dengan tumbangannya rezim orde baru membuka peluang bagi upaya untuk memperbaiki sistem anggaran yang membelit negara kita. Reformasi telah berhasil mengembalikan supremasi rakyat dan pemulihan kembali peran lembaga perwakilan rakyat.

Kata Kunci : penyusunan anggaran

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kinerja yang dicapai oleh suatu organisasi pada dasarnya adalah sebuah prestasi para anggota organisasi itu sendiri, mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Konsep kinerja pemerintah daerah sendiri muncul ketika institusi pemerintah mulai mencoba mengenalkan konsep baru dalam pengelolaan urusan publik menjadi *good governance*. Organisasi yang berhasil merupakan organisasi yang memiliki visi dan misi yang jelas terukur. Menurut Mahsun (2006:25), kinerja organisasi publik adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Pemerintah akhirnya mengimplementasikan kebijakan otonomi dan desentralisasi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Peningkatan wewenang penyusunan anggaran yang lebih besar bagi daerah memungkinkan daerah untuk membuat berbagai program yang lebih aspiratif bagi masyarakat daerah.

Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif (*Value for Money*) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anggaran daerah, khususnya belanja daerah belum mampu berperan sebagai insentif dalam

mendorong laju pembangunan di daerah. Di sisi lain banyak ditemukan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas dan kurang mencerminkan aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, karena kualitas perencanaan anggaran daerah relatif lemah (Fathillah, 2001).

Anggaran yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan oleh satuan kerja yang ada dalam pemerintah daerah dengan sendirinya berinteraksi dengan individu-individu yang ada dalam pemerintahan. Peranan dan kepentingan individu dalam organisasi pemerintah daerah mencapai tujuan pemerintah daerah didasarkan pada ketertarikan individu untuk memenuhi tujuan atau kepentingannya. Namun sering terjadi tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah bertentangan dengan tujuan individu sehingga menghasilkan kinerja individu yang rendah atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kinerja dari masing-masing individu tersebut akan berpengaruh pada kinerja pemerintahan secara menyeluruh.

Penganggaran memerlukan kerjasama para pimpinan satuan kerja dalam organisasi pemerintahan. Struktur organisasi satuan kerja menunjukkan tanggungjawab setiap pelaksana anggaran. Setiap pelaksana bertanggungjawab untuk menyiapkan dan mengelola elemen anggarannya masing-masing. Agar pelaksanaannya berjalan efektif, para pelaksana berpartisipasi merencanakan anggaran, sejauh mana partisipasi atau peran serta dalam penyusunan anggaran. Partisipasi dalam penganggaran dinilai dapat meningkatkan kinerja manajerial pimpinan satuan kerja yang pada akhirnya meningkatkan kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Perumusan Masalah

1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Manado ?
2. Apakah peran manajerial pengelola keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja perangkat Daerah Pemerintah Kota Manado ?
3. Apakah partisipasi penyusunan anggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap kinerja satuan kerja perangkat Daerah Pemerintah Kota Manado ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja satuan kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Manado.
2. Untuk mengetahui pengaruh peran manajerial pengelola keuangan daerah terhadap kinerja satuan kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Manado.
3. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah secara simultan terhadap kinerja satuan kerja perangkat Daerah Pemerintah Kota Manado.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden dan data sekunder berupa gambaran umum Pemerintah Kota Manado yang tertuang dalam buku "Kota Manado dalam Angka".

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode distribusi langsung (*direct distribution method*), yaitu mendatangi para responden secara langsung untuk menyerahkan ataupun mengumpulkan kembali kuesioner.

Hipotesis Penelitian

- H₀₁ : Partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah.
- H_{a1} : Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah.
- H₀₂ : Peran manajerial pengelola keuangan daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah.
- H_{a2} : Peran manajerial pengelola keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah.
- H₀₃ : Partisipasi penyusunan anggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah.
- H_{a3} : Partisipasi penyusunan anggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah.

Metode Analisis

Analisis data menggunakan *software* SPSS 17.0 dengan lima tahap. Pertama, statistik deskriptif. Tahap kedua, pengujian kualitas data. Tahap ketiga, melakukan uji penyimpangan asumsi klasik. Tahap keempat, melakukan analisis regresi berganda. Dan tahap kelima, melakukan pengujian hipotesis.

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Deskripsi Data Penelitian

Dari semua kuesioner yang dibagikan yaitu sebanyak 130 kuesioner, yang dapat diolah dan ditabulasi untuk tujuan analisis data yaitu sebanyak 88 kuesioner. Data ditabulasi adalah semua tanggapan atau jawaban responden atas setiap pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran, Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Data hasil tabulasi yang diolah dengan menggunakan program SPSS 17.0 menghasilkan deskripsi statistik variabel penelitian seperti pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y (kinerja SKPD)	29.5227	9.63826	88
X1 (partisipasi anggaran)	14.6932	5.18698	88
X2 (peran manajerial)	25.0341	10.02233	88

1. Untuk variabel X₁ (Partisipasi penyusunan anggaran) diperoleh rata-rata hitung skor jawaban responden 14.6932 dengan standar deviasi sebesar 5.18698 dan jumlah responden sebanyak 88.
2. Untuk variabel X₂ (Peran manajerial pengelola keuangan daerah) diperoleh rata-rata hitung skor jawaban responden 25.0341 dengan standar deviasi sebesar 10.02233 dan jumlah responden sebanyak 88.
3. Untuk variabel Y (Kinerja SKPD) diperoleh rata-rata hitung skor jawaban responden 29.5227 dengan standar deviasi sebesar 9.63826 dan jumlah responden sebanyak 88.

Dapat diketahui kategori jawaban responden masing-masing variabel yaitu:

- a. Skor untuk kategori sangat rendah = 1,00-1,80
- b. Skor untuk kategori rendah = 1,81-2,60
- c. Skor untuk kategori sedang = 2,61-3,40
- d. Skor untuk kategori tinggi = 3,41-4,20
- e. Skor untuk kategori sangat tinggi = 4,21-5,00

Tabel 2. Distribusi Jawaban Partisipasi Penyusunan Anggaran

Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat rendah	20	22,72
Rendah	16	18,18
Sedang	20	22,72
Tinggi	23	26,13
Sangat tinggi	9	10,22

Berdasarkan data tabulasi pada tabel 2 distribusi jawaban yang diberikan responden mengenai partisipasi penyusunan anggaran terdapat 23 orang (26,13%) yang banyak terlibat dalam partisipasi penyusunan anggaran. Hal ini berarti tingkat keterlibatan setiap individu dalam pengambilan keputusan dalam penganggaran sangat tinggi.

Tabel 3. Distribusi Jawaban Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah

Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat rendah	22	25
Rendah	18	20,45
Sedang	20	22,72
Tinggi	18	20,45
Sangat tinggi	10	11,36

Berdasarkan data tabulasi pada tabel 3 menunjukkan distribusi jawaban yang diberikan responden mengenai peran manajerial pengelola keuangan daerah terdapat 22 orang (25%) yang menjawab peran manajerial pengelola keuangan daerah sangat rendah. Disebabkan instrumen mengenai manajer selaku pemimpin dari suatu organisasi tidak ikut dilibatkan pengambilan sampel penelitian ini.

Tabel 4. Distribusi Jawaban Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat rendah	14	15,90
Rendah	16	18,18
Sedang	25	28,40
Tinggi	28	31,81
Sangat tinggi	5	5,68

Berdasarkan data tabulasi pada tabel 4 menunjukkan distribusi jawaban yang diberikan responden mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah terdapat 28 orang (31,81%) yang menjawab kinerja SKPD sangat tinggi. Hal ini berarti kinerja yang dicapai oleh pemerintah sangat tinggi.

Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2005). Hasil pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 5 berikut.

Tabel 5. Hasil Uji ultikolinearitas

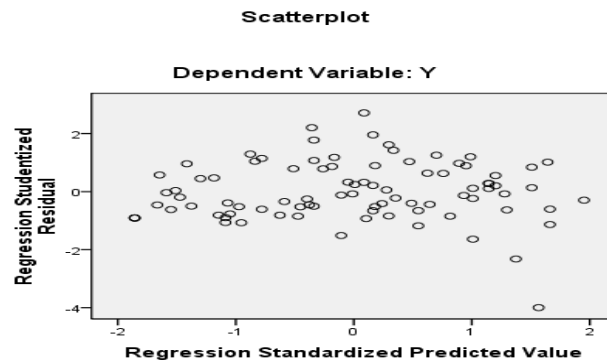
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 X ₁ (partisipasi anggaran)	.479	2.087
X ₂ (peran manajerial)	.479	2.087

a. Dependent Variable: Kinerja SKPD

Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa semua nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* < 10 dan semua variabel independen memiliki nilai *Tolerance* > 0.1 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. (Ghozali, 2005).



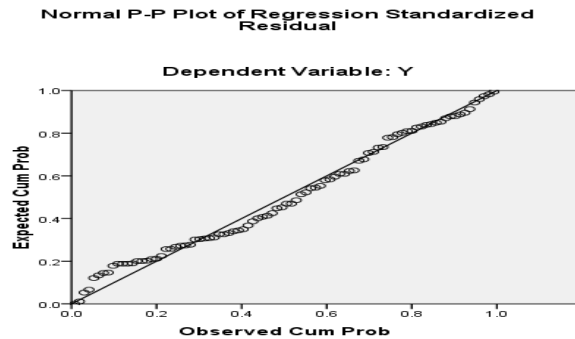
Gambar 1 Grafik Scatterplot

Dari Gambar 1 menunjukkan bahwa grafik *scatterplot* tidak membentuk pola yang teratur tetapi menyebar diatas maupun dibawah nilai nol pada sumbu Y sehingga dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

Hasil Uji Normalitas

Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, salah satu cara termudah melihat normalitas adalah melihat histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Melihat histogram bisa menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat *Normal Probability Plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal membentuk satu garis lurus

diagonal dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2005). Berdasarkan hasil pengujian SPSS, *Normal Probability Plot* yang terbentuk ditunjukkan pada gambar 2 berikut.



Gambar 2. Grafik Normalitas

Dari Gambar 2 dapat dilihat data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, dapat dikatakan distribusi data residual normal.

Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi berganda linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Menurut Trihendradi (2009:209) Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 6 berikut.

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.805 ^a	.648	.639	5.78739	1.196

a. Predictors: (Constant), Peran manajerial, Partisipasi anggaran

b. Dependent Variable: Kinerja SKPD

Dari Tabel 6. dapat dilihat nilai uji Durbin-Watson adalah 1.196 sehingga kesimpulannya terjadi autokorelasi.

Pengujian Statistik

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 7 merupakan hasil analisis regresi linear berganda pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah secara bersama-sama.

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	7.354	1.907		3.857	.000		
X1	.745	.173	.401	4.313	.000	.479	2.087
X2	.448	.089	.466	5.010	.000	.479	2.087

a. Dependent Variable: Kinerja SKPD

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat dilihat persamaan regresi linear berganda adalah $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$

$$Y = 7.354 + 0.745PPA + 0.448PMPKD$$

Persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta α sebesar 7.354 mempunyai arti bahwa jika Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah konstan atau sama dengan nol (0), maka besarnya variabel Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Y) sebesar 7.354.
2. Nilai β_1 yang merupakan koefisien regresi dari variabel X_1 (Partisipasi Penyusunan Anggaran) sebesar 0.745 mempunyai arti bahwa jika variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran mengalami peningkatan 1% maka besarnya variabel Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Y) juga ikut mengalami kenaikan sebesar 0.745 dengan asumsi variabel X_2 (Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah) tetap atau konstan.
3. Nilai β_2 yang merupakan koefisien regresi dari variabel X_2 (Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah) sebesar 0.448 mempunyai arti bahwa jika variabel Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah mengalami peningkatan sebesar 1%, maka besarnya variabel Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Y) juga akan ikut mengalami kenaikan atau peningkatan sebesar 0.448 dengan asumsi variabel X_1 (Partisipasi Penyusunan Anggaran) tetap atau konstan.

Berdasarkan nilai koefisien regresi tersebut, dapat diketahui pula bahwa ternyata Partisipasi Penyusunan Anggaran mempunyai hubungan yang lebih dominan terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dibandingkan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah.

Koefisien Korelasi (R)

Koefisien korelasi (R) digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) secara serentak. Dalam hal ini mengukur hubungan antara variabel bebas (X) secara serentak terhadap variabel

terikat (Y). Nilai R berkisar antara 0 sampai 1, nilai semakin mendekati 1 berarti hubungan yang terjadi semakin kuat, sebaliknya nilai semakin mendekati 0 maka hubungan yang terjadi semakin lemah.

Tabel 8. Koefisien Korelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.805 ^a	.648	.639	5.78739	1.196

a. Predictors: (Constant), Peran manajerial, Partisipasi anggaran

b. Dependent Variable: Kinerja SKPD

Dari Tabel 4.10 dapat dilihat nilai R adalah 0.805 yang memberi arti bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali,2005).

Tabel 9. Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.805 ^a	.648	.639	5.78739	1.196

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Dari Tabel 9 terlihat nilai R² adalah sebesar 0.648 atau 64.8% sehingga dapat disimpulkan bahwa Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Y) mendapat kontribusi dari Partisipasi Penyusunan Anggaran (X₁) dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah (X₂) sebesar 64.8% sisanya 35.2% kontribusi dari faktor atau variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji t

Uji t (t-test) ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh secara parsial (individu) variabel-variabel bebas (partisipasi penyusunan anggaran dan peran manajerial pengelolaan keuangan daerah) terhadap variabel terikat (kinerja SKPD) atau menguji signifikansi konstanta dan variabel terikat. Hasil perhitungan uji t dapat dilihat pada tabel 10 berikut ini.

Tabel 10. Hasil Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.354	1.907		3.857	.000
X ₁ (partisipasi anggar)	.745	.173	.401	4.313	.000
X ₂ (peran manajerial)	.448	.089	.466	5.010	.000

a. Dependent variable : kinerja SKPD

1. Pengujian Hipotesis Pertama (H₁)

Dari Tabel 10, nilai t hitung untuk variabel b₁ (partisipasi penyusunan anggaran) adalah 4.313 dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.000. Karena probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0.05 dapat disimpulkan bahwa H₀ ditolak dan H_a diterima. Pengaruh positif dan signifikan antara variabel partisipasi penyusunan anggaran terhadap variabel kinerja SKPD.

2. Pengujian Hipotesis Kedua (H₂)

Dari Tabel 10, nilai t hitung untuk variabel b₂ (peran manajerial pengelola keuangan daerah) adalah 5.010 dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.000. Karena probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0.05 dapat disimpulkan H₀ ditolak dan H_a diterima. Pengaruh positif dan signifikan antara variabel peran manajerial pengelola keuangan daerah terhadap kinerja SKPD.

Uji F

Hasil perhitungan uji F dapat dilihat pada tabel 11 berikut ini.

Tabel 11. Hasil Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5234.975	2	2617.487	78.148	.000 ^a
	Residual	2846.980	85	33.494		
	Total	8081.955	87			

- a. Predictors: (Constant), Peran manajerial pengelola keuangan daerah, Partisipasi penyusunan anggaran
- b. Dependent Variable: Kinerja SKPD

Dari uji ANOVA didapat nilai hitung F sebesar 78.148 dengan probabilitas signifikansi 0.000. Probabilitas signifikansi tersebut lebih kecil dari 0.05, dengan demikian hasil uji F menyatakan H_0 ditolak berarti H_a diterima maka variabel partisipasi penyusunan anggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja SKPD.

Pembahasan

Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja SKPD

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah berpengaruh positif 4,678 pada tingkat signifikansi 0,000, berarti signifikan karena berada dibawah nilai signifikansi yang dipersyaratkan 0,05, sehingga disimpulkan partisipasi dalam penganggaran tinggi meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Dari hasil pengujian hipotesis pertama menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah. Para manajer menengah dan bawah (pengguna dan kuasa pengguna anggaran/ barang) pada pemerintah Kota Manado terlibat atau ikut serta dalam penyusunan anggaran, karena dengan adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran, mereka diberi kesempatan untuk berperan dalam memberikan masukan-masukan dan ide-ide mereka yang dituangkan dalam bentuk anggaran yang nantinya akan mereka laksanakan.

Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah Terhadap Kinerja SKPD

Hasil pengujian hipotesis kedua menyatakan bahwa peran manajerial pengelola keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya suatu peran yang dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah (pengguna dan kuasa pengguna anggaran/ barang) untuk mendorong dan memotivasi bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi pemerintah Kota Manado. Peran manajerial para pengelola keuangan daerah seperti peran interpersonal, peran informasi dan peran pengambilan keputusan berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah. Para pengguna dan kuasa pengguna anggaran/barang pada Pemerintah Kota Manado merasa bertanggung jawab dan merasa ikut memegang kendali terhadap apa yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Adanya peran manajerial ini juga mendorong pengelola keuangan daerah untuk mempunyai komitmen yang tinggi untuk mencapai kinerja pemerintah daerah. Komitmen yang tinggi terhadap pengelolaan keuangan daerah mempunyai pandangan yang positif serta berusaha berbuat yang terbaik mencapai tujuan dan kinerja yang lebih baik.

Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah terhadap Kinerja SKPD

Hasil pengujian hipotesis ketiga menyatakan partisipasi penyusunan anggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah. Partisipasi dari tiap

individu dan pejabat pengelola keuangan daerah diterapkan secara bersama-sama maka kinerja dihasilkan dari satuan kerja perangkat daerah akan menghasilkan hasil yang baik bagi pemerintah daerah. Adanya keterlibatan tiap individu dan pimpinannya dalam menyusun anggaran akan menghasilkan ide-ide dan masukan-masukan terhadap perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Diperoleh kesimpulan mengenai Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Partisipasi Penyusunan Anggaran maka semakin meningkat Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Peran Manajerial Pengelola Keuangan daerah maka akan semakin meningkatkan Kinerja Satuan Kerja Perangkat daerah.
3. Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Saran

Peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu :

1. Menambah jumlah sampel yang diteliti. Dengan demikian, diharapkan tingkat generalisasi dari analisis akan lebih akurat.
2. Menambah variabel independen, dependen, moderating, intervening yang memiliki kemungkinan untuk berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah.
3. Untuk penelitian selanjutnya di instansi pemerintah sebaiknya tidak memakai partisipasi penyusunan anggaran sebagai variabel dependen dan menggunakan variabel lain seperti motivasi, senjangan anggaran, kenaikan gaji, jam kerja, gaya kepemimpinan, kepuasan kerja, dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara News, 2007, **Untuk Raih Gelar Doktor di UGM, Fadel Muhammad Sampaikan Teori Kepemimpinan**, Gorontalo, 10 Agustus 2007.
- Fathillah, Gina, 2001. **Evaluasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kalimantan Timur**, tesis S2 Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Ghozali, I. 2005. **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS**. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Ghozali, Imam dan Ratmono, Dwi, 2008, ***Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat (APBN) dan Daerah (APBD)***, Edisi 3, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Herminingsih. 2009. ***“Pengaruh Partisipasi Anggaran dalam Penganggaran dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah”***. Tesis Tidak Dipublikasikan, Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi, Universitas Diponegoro Semarang.
- Mahsun, Mohamad, 2009, ***Pengukuran Kinerja Sektor Publik***, BPFE Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Rachmawati. S. R. 2009. ***“Pengaruh Komitmen Organisasi, Motivasi Kerja, Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Bidang Keuangan Pada Pemda Kabupaten Sukoharjo”***. Skripsi Tidak Dipublikasikan, Program Sarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ramandei, P. 2009. ***“Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jayapura)”***. Tesis Tidak Dipublikasikan, Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi, Universitas Diponegoro Semarang.
- Rohman, A. 2007. ***“Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah Dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survei Pada Pemda Kota, Kabupaten, dan Provinsi di Jawa Tengah)”***. Jurnal MAKSI, Vol. 7, No. 2, pp.206-220.
- Rohman, A. 2009. ***Akuntansi Sektor Publik Telaah dari Dimensi : Pengelolaan Keuangan Daerah, Good Governance, Pengendalian, Pengawasan dan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah***. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.